



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.678.688.079.170,00
b. Belanja Daerah	Rp1.739.541.988.789,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp (60.853.909.619,00)</u>
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 231.549.706.413,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 59.414.295.678,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 172.135.410.735,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 111.281.501.116,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp30.327.576.079,00) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|------|----------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 1.709.015.655.249,00 |
| b) Realisasi | Rp | 1.678.688.079.170,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp) | 30.327.576.079,00 |
- (2). Selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah (Rp141.592.965.167,00) adalah:
- | | | |
|------------------------|------|----------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 1.881.134.953.956,00 |
| b) Realisasi | Rp | 1.739.541.988.789,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp) | 141.592.965.167,00 |
- (3). Selisih defisit anggaran dan defisit realisasi anggaran sejumlah Rp111.265.389.088,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| a) Defisit Anggaran perubahan | Rp | (172.119.298.707,00) |
| b) Defisit Realisasi | Rp | (60.853.909.619,00) |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 111.265.389.088,00 |
- (4). Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp4.520.276.071,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|--------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 227.029.430.342,00 |
| b) Realisasi | Rp | 231.579.706.413,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 4.520.276.071,00 |
- (5). Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp4.504.164.043,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 54.910.131.635,00 |
| b) Realisasi | Rp | 59.414.295.678,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 4.504.164.043,00 |
- (6). Selisih anggaran pembiayaan netto dan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp16.112.028,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|--------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 172.119.298.707,00 |
| b) Realisasi | Rp | 172.135.410.735,00 |
| Selisih/lebih (kurang) | Rp | 16.112.028,00 |

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 188.309.853.466,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 60.853.909.619,00 |
| c. Sub Total (a-b) | Rp | 127.455.943.847,00 |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Rp16.174.442.731,00) (SiLPA/SiKPA) | | |
| e. Sub Total (c+d) | Rp | 111.281.501.116,00 |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| g. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 111.281.501.116,00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	
1) Aset lancar	Rp 186.230.195.732,50
2) Investasi nonpermanen	Rp 841.160.008,40
3) Investasi Permanen	Rp 141.904.966.445,75
4) Aset tetap	Rp 2.399.820.009.280,28
5) Dana cadangan	Rp 7.500.000.000,00
6) Aset lainnya	Rp 29.080.276.127,58
Jumlah Aset	<u>Rp 2.765.376.607.594,51</u>
b. Kewajiban	
1) Kewajiban jangka pendek	Rp 114.335.345.694,62
2) Kewajiban jangka panjang	Rp 31.205.062.058,00
Jumlah Kewajiban	<u>Rp 145.540.407.752,62</u>
c. Ekuitas	Rp 2.619.836.199.841,89
Jumlah Ekuitas	<u>Rp 2.619.836.199.841,89</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u><u>Rp 2.765.376.607.594,51</u></u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp 1.591.316.710.568,58
b. Jumlah Beban	Rp 1.339.732.644.060,59
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Rp 251.584.066.507,99
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp 963.284.675,00</u>
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 250.620.781.832,99

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

(1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
1) Arus kas masuk	Rp 1.534.834.001.285,00
2) Arus kas keluar	<u>Rp 1.225.695.069.810,00</u>
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 309.138.931.475,00

(2)	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
	1) Arus kas masuk	Rp 41.400.000,00
	2) Arus kas keluar	Rp 356.798.240.560,00
		<hr/>
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset	Rp (356.756.840.560,00)
(3)	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
	1) Arus kas masuk	Rp 12.281.237.773,00
	2) Arus kas keluar	Rp 31.991.322.585,00
		<hr/>
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp (19.710.084.812,00)
(4)	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
	1) Arus kas masuk	Rp 53.579.949.442,00
	2) Arus kas keluar	Rp 52.850.327.787,00
		<hr/>
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 729.621.655,00
(5)	Kenaikkan (Penurunan) Bersih Kas selama periode	Rp (66.598.372.242,00)
(6)	Saldo Awal Kas di BUD	Rp 160.336.224.247,00
(7)	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp 93.737.852.005,00
	a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:	
	Kas di Kasda	Rp 93.726.869.243,00
	Kas di Bendhara Penerimaan	Rp 10.948.600,00
	b. Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)	Rp 280.234.228,00
	c. Kas di BLUD	Rp 12.714.466.834,00
	d. Kas di Bendahara JKN	Rp 4.598.055.207,00
	e. Kas di Bendahara BOS	Rp 3.629.136.839,00
(8)	Saldo Akhir Kas	Rp 114.959.745.113,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 2.499.531.326.514,36
b. Surplus/Defisit LO	Rp 250.620.781.832,99
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	(Rp 130.315.908.505,46)
	<hr/> <hr/>
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.619.836.199.841,89

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran 1.2: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan;
 - Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO)
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- h. Lampiran VIII: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI: Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- s. Lampiran XIX: Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarakan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebagai pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (19/2017)